



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

KECAMATAN BATUI

Alamat : Jalan Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos 94762

KEPUTUSAN CAMAT BATUI
NOMOR : 800 / 235 / XII / Kec.Bti/ 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN
BATUI TAHUN 2016 - 2021**

CAMAT BATUI,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan BAtui Tahun Anggaran 2016-2021, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Batui Tahun Anggaran 2016-2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggao Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten BAnggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten BAnggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perayiran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten BAnggai Tahun 2018 Nomor 9).

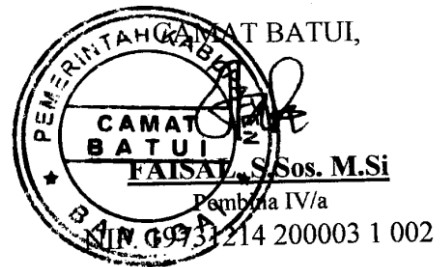
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BATUI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENSTRA KECAMATAN BATUI TAHUN 2016-2021

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra
Kecamatan Batui Tahun 2016-2021 sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini

- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terkait oleh ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Batui.

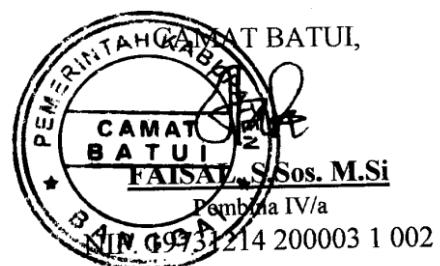
Ditetapkan di Batui
pada tanggal 17 Desember
2018



Lampiran :Keputusan Kepala Camat Batui
Nomor : 800 / / XII / 2018
Tanggal : 17 Desember 2018

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PADA KECAMATAN BATUI
TAHUN 2016-2021**

No	Nama / Nip	Jabatan
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Sekretaris Camat	Penanggung Jawab
3	Kasubag Perencanaa, Keuangan dan Pelaporan	Ketua
4	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Sekretaris
5	Lurah se Kec. Batui	Anggota
6	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota
7	Irma	Anggota
8	Amirudin Kadim	Anggota
9	Asep Hendra, S.Sos	Anggota





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

KECAMATAN BATUI

Alamat : Jalan Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos 94762

KEPUTUSAN CAMAT BATUI

NOMOR : 800 / 35 / II / Kec.Bti/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

CAMAT BATUI,

- Menimbang :
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai NomorTahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor ...Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai 2016-2021 setiap OPD wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
 - d. bahwa Perubahan Rencana Strategis OPD tersebut berisi program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan untuk dua tahun terakhir (2017-2018) disesuaikan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran yang harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batui tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Batui Tahun 2016-2021
- Mengingat
- 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 - 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 - 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5589);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Batui Tahun 2016 - 2021
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat

Daerah
Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII : Penutup

KETIGA : Evaluasi terhadap Perubahan Rencana Strategis sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 Februari 2019

CAMAT BATUI



F A I S A L, S.Sos, M.Si

NIP. 19731214 200001 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	8
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
A. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	9
B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	13
C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	20
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	40

IV.	TUJUAN DAN SASARAN	44
	A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
V.	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	44
VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
VIII.	PENUTUP	50

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

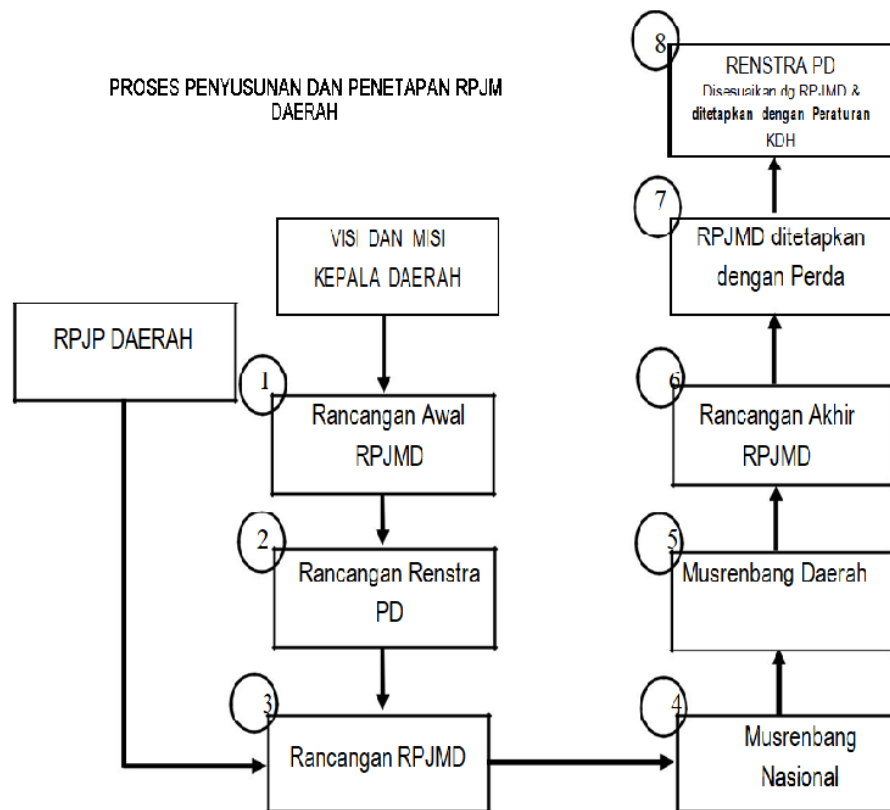
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPJMD 2016-2021. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,

sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan. Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat

indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Kecamatan Batui. Dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

18. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
21. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Batui 2016-2021 dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021, sehingga akan terjadi sinergisitas antara visi, misi, sasaran dan tujuan.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Batui 2016-2021 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta maupun pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Banggai secara sinergis, sebagai pedoman bagi instansi maupun personil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai visi, misi,

sasaran dan tujuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Batui 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rentra K/L dan Renstra
Telaahan rencana tata ruang Wilayah dan Kajian
- 3.4 Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan Rencana Tata Ruang

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BATUI

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Batui

Sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi Perangkat daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah.
2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaanmasyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturanperundang-undangan
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahDesa/Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuptugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatankecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangtugasnya.

B. Sumber Daya Kantor Kecamatan Batui

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan fungsinya Camat beserta perangkatnya (Sekretariat dan Seksi-seksi) mempunyai tugas sebagai berikut:

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 dijelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

1. CAMAT

Camat Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional kecamatan di bidang kesekretariatan yang meliputi penyiapan penyelenggaraan urusan administrasi, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas umum, aset, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Untuk menjalankan fungsinya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian terdiri dari :

Kepala Sub Bagian Umum, Aset & Kepegawaian yang mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, aset dan kepegawaian meliputi persiapan bahan penyelenggaraan urusan, persiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan umum, aset dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan & Evaluasi yang mempunyai tugas yaitu :.

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan perencanaan, Keuangan dan evaluasi meliputi persiapan bahan penyelenggaraan urusan, persiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, keuangan dan evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pemerintahan

Kepalaseksi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemerintahan meliputi, persiapan bahan penyelenggaraan urusan, persiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum meliputi persiapan bahan penyelenggaraan urusan, persiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

6. Seksi Pembangunan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pembangunan meliputi penyiapan bahan, penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan, pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

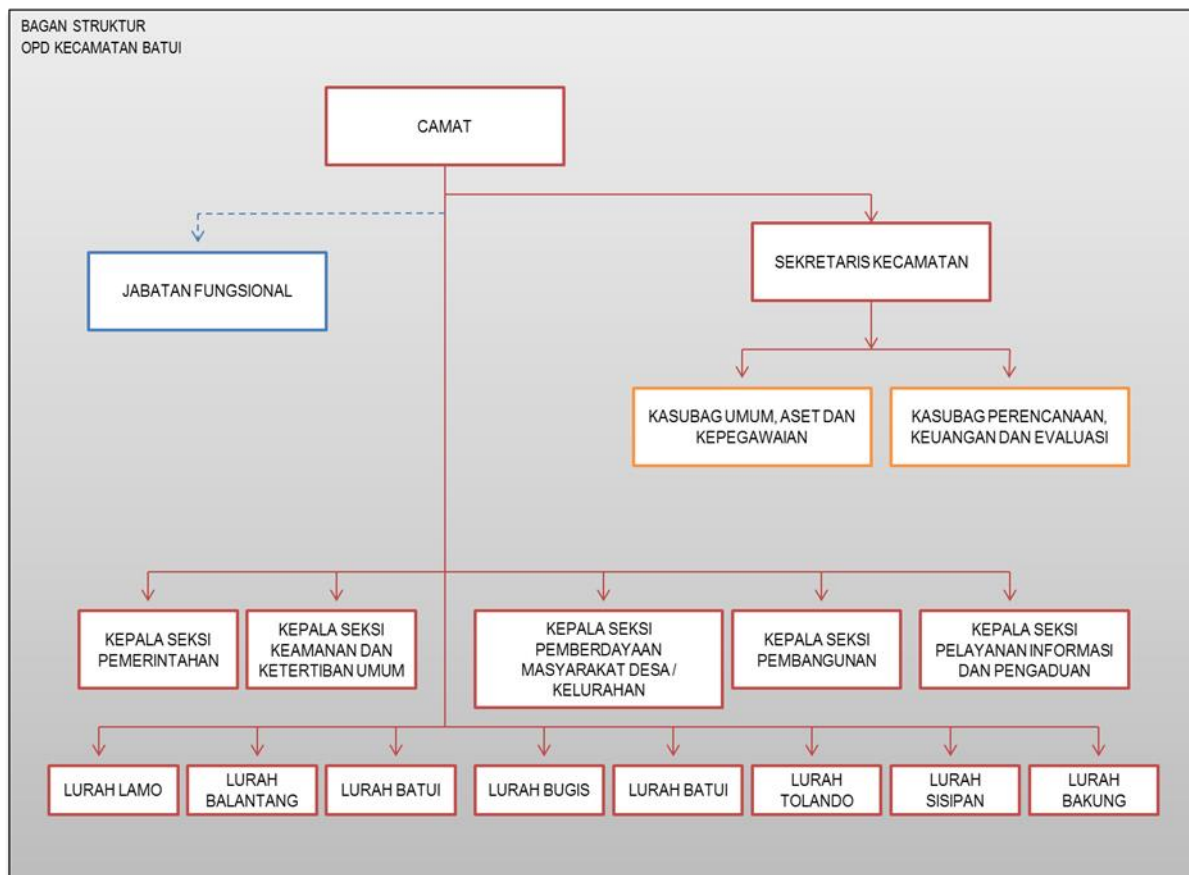
B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUI

Struktur Organisasi Kecamatan Batui terdiri dari :

Camat	: HARIANTO K. GALIB, S.Sos
Sekretaris Camat	: MUSLIH B. ADING, S.Pd
Kasi Pemerintahan	: ZURAIDA B. SALAM, S.Sos
Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum	: ARDAN, S.Pd
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	: SUARNI SOTANI
Kasi Pembangunan	: Drs. MAKMUR
Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	: Hj. BAHRIA DG. MANGATA, S.Pd
Kasubag Umum, Aset & Kepegawaian	: WIRDA K. LASANANG, S.Kom
Kasubag Perencanaan Keuangan & Evaluasi	: MARIYANI LAMADA, SH

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN BATUI



Wilayah Administrasi, Data Lembaga dan Pejabat Pemerintahan

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS KM ²	PEJABAT	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK		
				RT	RW	DSN/LING	LK	PR	JML
1	Lamo	113,02	MUHAMMAD IKAF, S.Sos	7	16	3	925	857	1782
2	Balantang	93,84	UMAR SY ABDUL, S.Sos	5	11	3	676	721	1397
3	Bugis	76,40	BUDIANTO K. ABDUL RAHMAN, S.Sos	2	6	2	202	232	434
4	Batui	14,76	RINA HARIANI AS. KADIR, S.Pi	2	6	2	296	300	596
5	Tolando	94,36	ABD. HARIS, SE	7	16	4	1051	1006	2057
6	Sisipan	74,76	ARDAN, S.Pd	6	13	3	956	949	1905
7	Bakung	36,00	Drs. MAKMUR	4	10	3	600	639	1239
8	Uso	126,36	SURAIT SALIM	-	12	3	562	528	1090
9	Honbola	123,27	ROJES KUTONDONG	-	12	3	478	445	923
10	Nonong	61,88	SAMUDIN MASAGALA	3	4	3	895	890	1785
11	Kayowa	122,39	LUKMAN A. KHAIRUDIN	3	3	3	411	384	795
12	Ondo – Ondolu I	60,00	WISMAN	-	6	3	386	349	735
13	Ondo - Ondolu	65,32	SUWARNO	-	4	4	588	530	1118
	Kecamatan Batui	1.062,36							16.840

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi Aparatur adalah potensi Aparatur Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi para aparat kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia maka aparat yang ada perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan

formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasi dan loyalitasnya. Adapapun Data Aparatur Sipil Negara yang ada pada OPD Kecamatan Batui sebagai berikut :

No	Jumlah ASN	Jenis Kelamin	Pendidikan			
			S2	S1	Diploma	SMA
1.	1	L	1			
2.	20	L		√		
3.	13	P		√		
4.	1	P			√	
5.	9	L				√
6.	13	P				√
Total	57					

data Honorer yang ada pada lingkup Kantor Camat Batui yaitu :

No	Jumlah Honorer	Jenis Kelamin	Pendidikan			
			S2	S1	Diploma	SMA
1.	2	L		√		
2.	8	P		√		
3.	18	P				√
4.	6	L				√
Total	34					

h. Sarana Pendukung

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Wilayah Kecamatan Turen didukung dengan sarana yang meliputi :

1. Sarana Kerja, sebagai berikut :

No.	Jenis sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Ruang Rapat	1	Baik
5.	Ruang PKK	1	Baik
6.	Ruang Computer	1	Baik
7.	Gudang	1	Baik
8.	Mobil dinas Camat	1	Baik
9.	Sepeda motor dinas	4	Baik
10.	Meja Kerja	15	Baik
11.	Kursi kerja & kursi tamu	20	Baik
12.	Kursi rapat	6	Baik
13.	Papan data / Informasi	1	Baik
14.	Kamar mandi	2	Baik
15.	Komputer	2	Baik
16.	Printer	4	Baik
17.	Televisi	1	Baik
18.	Mesin Absensi	1	Baik
19.	Filling Cabinet	2	Baik
20.	Rak arsip	1	Baik
21.	Lemari kayu	6	Baik
22.	Lemari besi	2	Baik

I. Pegawai Kecamatan Batui

NO	NAMA / NIP	Pangkat / Golongan	JABATAN/SKPD	KET
1	HARIANTO K. GALIB, S.Sos NIP. 19731214 200003 1 002	Pembina, IV/a	Camat Batui	
2	MUSLIH B. ADING, S.Pd NIP. 19660814 198611 1 001	Penata Tkt I, III/d	Sekcam Batui	
3	ARDAN, S.Pd NIP. 19651215 198603 1 020	Penata Tkt I, III/d	Kasi Trantibum Kec. Batui	
4	SUARNI SOTANI NIP. 19660605 199412 2 004	Penata Tkt I, III/d	Kasi Pemberdayaan Masy. Desa/Kelurahan Kec. Batui	
5	ZURaida B. SALAM, S.Sos NIP. 19630820 198603 2 014	Penata Tkt. I, III/d	Kasi. Pemerintahan Kec. Batui	
6	Drs. MAKMUR NIP. 19610819 198703 1 005	Penata III/c	Kasi Pembangunan Kec. Batui	
7	Hj. BAHRIA DAENG MANGATA, S.Pd NIP. 19760915 200604 2 008	Panata, III/c	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kec. Batui	
8	MUHAMAD IKAF, S.Sos NIP. 19781023 200012 1 004	Penata Muda Tkt, I III/b	Lurah Kel. Lamo	
9	UMAR SYAMSUDIN ABDUL, S.Sos NIP. 19681005 200003 1 008	Penata Tkt I, III/d	Lurah Kel. Balantang	
10	BUDIANTO K. ABDUL RAHMAN, S.Sos NIP. 19810514 200801 1 003	Penata Muda Tkt, I III/b	Pj. Lurah Kel. Bugis	
11	RINA HARIANI A. S. KADIR, S.Pi NIP. 19801216 201001 2 006	Panata, III/c	Lurah Kel. Batui	
12	ABD. HARI, SE NIP. 19660627 199403 1 005	Panata, III/c	Lurah Kel. Tolando	
13	SALAMULHAQ. B. KAJAB, S.Sos NIP. 19630530 199412 1 005	Penata Tkt I, III/d	Lurah Kel. Sisipan	
14	ABDULLAH HI. KARIM, SP NIP. 19650525 199903 1 005	Penata Tkt I, III/d	Lurah Kel. Bakung	
15	WIRDA K. LASANANG, S.Kom NIP.19740605 200212 2 011	Penata III/c	Kasubag. Umum, Aset dan Kepegawaian Kec. Batui	
16	MARIYANI LAMADA, SH NIP. 19840916 201012 2 005	Penata Muda III/a	Pj. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kec. Batui	
17	NURWAHIDA BIDULLAH, S.Sos NIP. 19810504 201001 2 004	Penata Muda III/a	Seklur Kel. Lamo	

18	LISNAWATI NIP. 19641126 198612 2 001	Penata, III/c	Seklur Kel. Balantang	
19	ZAINAL ARIFIN, S.Sos NIP. 19730510200801 1 008	Penata Muda Tkt, I III/b	Seklur Kel. Bugis	
20			Seklur Kel. Batui	
21	MUNIFA LAHAMA, S.Ag NIP. 19770721 200902 2 001	Panata, III/c	Seklur Kel Tolando	
22		Penata Muda Tkt, I III/b	Seklur Kel. Sisipan	
23	ROSMAWATI PATAWARI, S.Pt NIP. 19731015 200604 1 004	Penata Tkt I, III/d	Seklur Kel. Bakung	
24	SYAKILLAH, ST NIP. 19750914 201412 2 003	Penata Muda Tkt, I III/b	Kasi Pemerintahan Kelurahan Lamo	
25	ASEP HENDRA, S.Sos NIP. 19670619 200906 1 001	Penata Muda III/a	Pj. Kasi Pemerintahan Kelurahan Balantang	
26			Kasi Pemerintahan Kelurahan Bugis	
27	NURYANI, S.Sos NIP. 19730526 200801 2 007	Penata Muda III/a	Kasi Pemerintahan Kelurahan Batui	
28			Kasi Pemerintahan Kelurahan Tolando	
29	RONAL REPPI, S.Sos NIP. 19680524 200312 2 003	Penata, III/c	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sisipan	
30			Kasi Pemerintahan Kelurahan Bakung	
31	DJALIL LATTA, SH NIP. 19690810 200906 1 004	Penata Muda III/a	Pj. Kasi Pembangunan & Kesmas Kelurahan Lamo	
32	AKBAR, S. IP NIP. 19640905 200312 1 004	Penata Muda Tkt. I III/b	Kasi Pembangunan & Kesmas Kelurahan Balantang	
33	ROSNAWATI NAWAWI, S.Sos NIP. 19801027 200801 1 010	Penata Muda Tkt, I III/b	Kasi Pembangunan & Kesmas Kelurahan Bugis	
34	RAHMA ALI NIP. 19730118 2000012 2 003	Penata Muda III/a	Kasi Pembangunan & Kesmas Kelurahan Batui	
35	RAKHMAN RIAJANG NIP. 19640327 198503 1 009	Penata Muda Tkt. I III/b	Kasi Pembangunan & Kesmas Kelurahan Tolando	
36	FATMA, SH NIP. 19800414 200501 2 010	Penata Muda III/a	Pj. Kasi Pembangunan & Kesmas Kelurahan Sisipan	

37	MASTIAR DG. PATOMPO, S. Hut NIP. 19760825 200801 2 007	Panata, III/c	Kasi Pembangunan & Kesmas Kelurahan Bakung
38	ZULFAN M. PATAPE, S.Pd NIP. 19830723 201001 1 012	Penata Muda III/a	Kasi trantib, informasi & pengaduan Kelurahan Lamo
39			Kasi trantib, informasi & pengaduan Kelurahan Balantang
40	HASMIA LAHADJI, S.IP NIP. 19760408 200701 2 016	Penata Muda Tkt, I III/b	Kasi trantib, informasi & pengaduan Kelurahan Bugis
41	HASMAN M. AGAMA, SH NIP. 19790908 200902 1 004	Penata Muda Tkt, I III/b	Kasi trantib, informasi & pengaduan Kelurahan Batui
42	SAHDIN NIP. 19690412 199702 1 001	Penata Muda III/a	Kasi trantib, informasi & pengaduan Kelurahan Tolando
43	AHMAD A. DG. MAROA, S.Kom NIP. 19800211 200903 1 002	Panata, III/c	Kasi trantib, informasi & pengaduan Kelurahan Sisipan
44			Kasi trantib, informasi & pengaduan Kelurahan Bakung
45	ABDUL HAK B. SALAM, S.Pd NIP. 19680929 199303 1 011	Pembina, IV/a	JP. Pengadministrasi Pemerintahan Kec. Batui
46	Drs. ALWI LATIF NIP. 19631121 199203 1 007	Pembina Tkt I, IV/b	JP. Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kab. Banggai (dipekerjakan di Kantor Kel. Sisipan)
47			JP. Pengolah Data Kepegawaian Kec. Batui
48	NURMIATI PANSAB NIP. 19620109 198101 2 001	Pengatur Tkt I, II/d	JP. Pengadministrasi Umum Kec. Batui
49	AMIRUDIN KADIM NIP. 19820112 201001 1 010	Pengatur, II/c	JP. Pengelola Sarana dan Prasarana Kec. Batui
50	ALFONS BARAMING NIP. 19720321 200604 1 005	Pengatur Muda Tkt I, II/b	Bendahara Kec. Batui
51			JP. Pengadministrasi Umum Kel. Balantang
52	HASBIA NIP. 19671128 200801 2 008	Pengatur II/c	JP. Pengelola Data Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Kel. Bugis
53	IQBAL D. ALI NIP. 19801223 201504 1 002	Pengatur Muda II/a	JP. Pengadministrasi Umum Kel. Bugis
54	LISMAWATI N. GANI NIP. 19820316 201412 2 001	Pengatur Muda Tkt I, II/b	JP. Pengelola Data Pemerintahan & Kependudukan Kel. Sisipan
55	ASWIN M. MANGANGKA NIP. 19750312 200701 1 021	Pengatur Muda Tkt I, II/b	JP. Pengelola Data Pemerintahan & Kependudukan Kel. Bakung

56	RENI SANTOSO NIP. 19850623200604 2 004	Pengatur , II/c	JP. Pengelola Data Pemerintahan & Kependudukan Kel. Tolando
57	HARDIANTO HUSIN SONO NIP. 19680124 200701 1 014	Pengatur Tkt I, II/d	JP. Pengolah Data Ketentraman & Ketertiban Umum Kel. Tolando
58	NAICA NIP. 19800507 201411 2 005	Pengatur Muda II/a	JP. Pengadministrasi Umum Kel. Bakung
59	MUHAMMAD NUR NIP. 19680807 200906 1 009	Pengatur Muda Tkt I, II/b	JP. Pengolah Data (Ketentraman dan Ketertiban) Kec. Batui
60	AMBOSAKKA DG. MANRAPI NIP. 19671217 201410 1 001	Juru, I/c	Pelaksana Kantor Kelurahan Bakung
61	BURHANUDIN NIP. 19791129 201411 1 001	Pengatur Muda II/a	JP. Pengelolah Kepegawaian Kec. Batui

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan Pelayanan Kecamatan Batui selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.1																			
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BATUI KABUPATEN BANGGAI																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun Ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	-	-	-	0	92	1000	1200	1200	0	92	1000	1200	1200	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Tersedianya Alat Tulis kantor	-	-	-	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/bangunan Kantor	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7	Tersedianya Makanan dan Minuman	-	-	-	0	425	1400	1790	1800	0	425	1400	1790	1800	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	-	-	-	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Tersedianya tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	-	-	-	0	0	8	10	10	0	0	8	10	10	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
10	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	-	0	1	0	0	2	0	1	0	0	2	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11	Tersedianya Pengadaan Pengkapan Gedung Kantor	-	-	-	0	1	4	1	6	0	1	4	1	6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	0	0	3	2	5	0	0	3	2	5	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
13	Tersedianya Pengadaan Meubelair	-	-	-	0	31	0	130	2	0	31	0	130	2	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
14	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-	-	-	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Tersedianya Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	-	-	-	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
16	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	-	-	-	0	2	4	4	4	0	2	4	4	4	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	Tersedianya Pakarair/ruas desera pelapak se-sepus	-	-	-	0	15	13	28	28	0	15	13	28	28	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
19	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	-	-	-	0	0	6	6	6	0	0	6	6	6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Lendah mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncanakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Melihat dari tabel tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari masing-masing program diatas 90 % dengan kategori sangat tinggi, hanya saja pada Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD dimana terdapat Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) rasionya hanya 82,53%. Dari rasio tersebut secara kumulatif dapat dikatakan baik, namun apabila dilihat pada masing-masing kegiatan akan terlihat rasio yang kurang baik. Hal tersebut tergambar pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Penyediaan jasa pemeliharaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
2. Terdapat kegiatan seperti Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional sangat sulit diprediksi dan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik.

Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tergantung pada perangkat daerah lain sehingga hal ini bisa mempengaruhi progres pelaksanaan program pada Kecamatan Batui.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batui

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kabupaten Banggai 2017-2021 dan Kecamatan Batui akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan Batui.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Batui ke depan antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.

3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

5. Adanya Perda tentang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Kecamatan Batui memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Batui.
6. Adanya Pelimpahan Kewenangan Bupati yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor : 100/1378/PUM.OTDA tentang Penetapan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.
 1. Analisa Internal dan Eksternal
 - a) Faktor Internal

Kekuatan

- 1) Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman.
- 2) Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi.
- 3) Adanya SOP sesuai ketugasan.
- 4) Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
- 5) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- 6) Lingkungan kerja yang kondusif.
- 7) Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
- 8) Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.

- 9) Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- 1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Batui dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- 2) Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
- 3) Sarana dan prasarana instansi kurang memadai sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- 6) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

b) Faktor Ekternal

Peluang

- 1) Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- 2) Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- 3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan / wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
- 4) Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .

- 5) Adanya fasilitas wisata : sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- 7) Adanya sarana kesehatan (Puskemas dan Pustu).

Ancaman

- 1) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- 2) sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal, sehingga perlu pengelolaan yang baik untuk meningkatkan PAD

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
- 3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
- 7) Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
- 8) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Batui

Perangkat Daerah Kecamatan Batui dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Banggai. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Banggai melalui Keputusan Bupati Banggai Nomor 100/1378/Pum.Otda.

Berdasarkan Perda Kab. Banggai Nomor : 4 Tahun 2016, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah :

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil
2. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan Perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi
3. Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, perencanaan, barang dll
4. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP)) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan publik
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kelurahan yang lebih representative

6. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan
Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	eksternal	
Kesekretariatan	Rangkap Jabatan Fungsional	UU ASN		1. Adanya moratorium pegawai	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1. Umum Sumber Daya Manusia Tidak Sesuai 2. Anjab Banyaknya pelanggaran perda perijinan, Masalah Pekat Kurang 1. Tenaga pengamanan wilayah Dan Keamanan Lingkungan 2. Regulasi Pelimpahan Kewenangan	Perda perijinan, perda retribusi, Perda pelimpahan kewenangan	Kurang sosialisasi Perda	1. kurang kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan 2. masih banyak Pelaku kriminalitas	1. kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang Dilaksanakan blm ada Juknis, Juklak

Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	<p>1 .standar sarpras pelayanan Public belum memenuhi</p> <p>2 media informasi kepada masyarakat terbatas</p>	<p>1. peraturan Ttg pelayanan publik, SOP</p> <p>2. UU keterbukaan informasi Public</p>	<p>1. kondisi kantor kurang memadai</p> <p>2. Kemampuan di bidang IT terbatas</p>	<p>1. Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi</p> <p>2. Keterbukaan informasi public kepada masyarakat dari pemerintah</p>	Standar pelayanan public belum memenuhi standar pelayanan
Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Batui	<p>3. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum maksimal</p> <p>4. Penempatan tenaga Teknis Berkait pelayanan perizinan Belum mencukup Sesuai kompetensi, sehingga Pelaksanaan Kurang Optimal</p> <p>5. Sarana dan prasarana ruang pelayanan kelurahan yang kurang representatif</p> <p>1. masyarakat sangat menuntut fasilitasi dari pemerintah</p> <p>2. Partisipasi Masyarakat Terhadap</p>	<p>Perbup pelimpahan kewenangan, pagu indikatif</p>	<p>SDM dan anggaran yang terbatas</p>	<p>Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah</p>	<p>Keterbatasan kewenangan kecamatan</p> <p>Keterlambatan laporan pertanggungjawa</p>

Penyelenggaraan Perekonomian pembangunan wilayah	laporan Rendah Sarana Prasarana wilayah rusak	Perbup pelimpahan kewenangan	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Masyarakat untuk Memperbaiki yang rusak	ban dari masyarakat
--	--	------------------------------	--------------------------------	--	---------------------

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Batui. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa lima tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain :

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
6. Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.

7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Banggai, maka visi Kabupaten Banggai yang hendak dicapai pada Tahun 2016 -2021 adalah

“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholders dalam merelalisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Banggai secara komprehensif.

Misi

Untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, maka Kecamatan mendukung melalui :

Misi I : **Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa** dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan dengan sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan (2) Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik, bersih

dan akuntabel.

Selanjutnya agar Eksistensi Camat lebih berperan, mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor :37 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat dibidang Pemerintahan. Atas dasar hal tersebut Camat dituntut untuk :

Aktif melaksanakan Program – program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

1. Mampu mengemban fungsi dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada kewenangan (Legalitas formal), wibawa dan kemampuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.
3. Mengembangkan sikap pro aktif dengan membudayakan 4 CT dan **3 K**, yaitu : **CEPAT TEMU, CEPAT TANGGAP, CEPAT TINDAK** dan **CEPAT TUNTAS** dengan selal melaksanakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif.
4. Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengawasan, pembinaan dan fungsi kewilayahan dengan memperhatikan aspirasi dan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pelaksanaan Prinsip tata Pemerintahan yang baik, yaitu : Partisipasi, Penegak Hukum, Transparan, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke depan, Pengawasan, Efektif dan Efisien, Profesional.

Adapun fungsi dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari daerah.
2. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
3. Pelaksanaan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat desa/kelurahan, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tingkat kecamatan.

c. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam rangka mengemban amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 20, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut 9 Azas, yaitu :

1. Azas Kepastian Hukum Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara Azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
3. Azas Kepentingan Umum Azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Azas keterbukaan Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Azas Proporsionalitas Azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Azas Profesionalitas Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Azas Akuntabilitas Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Azas Efisiensi
9. Azas Efektifitas

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Banggai

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang Berkualitas	1	Jumlah peristiwa konflik sosial Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	≤ 83 peristiwa 73,2%	≤ 83 peristiwa 77,5%
2		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan Pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja pemerintahan pada daerah otonom baru	20 %	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah	45 %	70 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pembangunan daerah	5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
		1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi

				dan 204 kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20% 60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10% 50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 100% provinsi 5% Kab/kota 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% 70% berkinerja baik berkinerja baik

1	2	3	4	5	
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat Waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat Waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan	3	Jumlah desa swasembada Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang Akurat	2.000 desa 34 provinsi 514 Kab/kota	10.000 desa 34 provinsi 514 Kab/kota
		1	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	2	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap	50%	85%

	bidang pemerintahan dalam negeri	2	menjadi kader pelopor revolusi mental	65%	85%
			Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni		
		3	Peningkatan kompetensi aparaturnya Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Renstra Kemendagri Th. 2015-2019 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Batui dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Batui dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi / pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Batui tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Batui disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Banggai untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten Banggai

Referensi renstra Kabupaten Banggai adalah Bagian Tata Pemerintahan. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Bupati Banggai terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Batui akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kabupaten Banggai kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama dengan adanya Posyandu Pra Konsepsi serta perhatian dalam penurunan angka stunting melalui Rembuk Stunting, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Batui adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai telah melaksanakan PATEN. PATEN Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi

antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu** tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Batui, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi

pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Batui, , Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelura

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Keputusan Bupati pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh

kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Banggai.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Batui.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Banggai, maka visi Kabupaten Banggai yang hendak dicapai pada Tahun 2016 -2021 adalah

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi,
Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholders dalam merelalisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Banggai secara komprehensif.

Misi

Untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, maka Kecamatan mendukung melalui :

Misi I : **Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa** dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan dengan sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dan (2) Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Kecamatan Batui periode tahun 2017 – 2021 adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan public di tingkat Kecamatan”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Batui memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Batui dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Rumusan Indikator Tujuan

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat /Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterimawarga masyarakat dari Pemerintah Kecamatan Batui dalam melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu 5 tahun meningkat dari 90 menjadi 99,9. Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Batui untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Batui menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas Pelayanan public di tingkat kecamatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2016 sampai dengan 2021. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Batui menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Batui mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Batui.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Batui mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. PELAKSANAAN MASING-MASING BIDANG

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai tahun 2018 masing-masing bidang/seksi

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan melaksanakan :
 - a. Musrenbang Kecamatan
 - b. Pembinaan, pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Pembinaan Lomba Desa
 - d. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan melaksanakan :
 - a. Pembuatan Surat Rekomendasi tidak mampu
 - b. Pembinaan masalah raskin
 - c. Pembinaan Jamkesda
 - d. Pembinaan Posyandu
3. Seksi Pemerintahan melaksanakan :
 - a. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk
 - b. Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga
 - c. Sosialisasi peraturan pemberdayaan yang mengatur desa
 - d. Sosialisasi sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum melaksanakan :

- a. Koordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat menyangkut ketertiban dan ketentraman.
 - b. Sosialisasi dan penertiban masalah miras
 - c. Pemantauan terhadap ketertiban dan ketentraman.
5. Seksi Pembangunan melaksanakan :
- a. Pelayanan administrasi perijinan IMB, SITU, SKTU
 - b. Koordinasi pelayanan administrasi perijinan dengan instansi terkait
 - c. Sosialisasi aturan administrasi perijinan.
6. Subag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi melaksanakan :
- a. Penyusunan Renja, RKA, DPA
 - b. Koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyusunan program kerja
 - c. Menginventarisir program kegiatan sebagai bahan penyusunan Renja, RKA, DPA
 - d. Mengevaluasi program kerja
 - e. Menyusun Laporan Tahunan
 - f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
 - g. Pengelolaan Anggaran
 - h. Pertanggung jawaban Anggaran
 - i. Administrasi Keuangan
 - j. Melaporkan Penggunaan Anggaran.
7. Subag Umum, Kepegawaian dan asset melaksanakan :
- a. Urusan surat menyurat, kearsipan
 - b. Urusan perlengkapan dan rumah tangga

- c. Urusan Administrasi Kepegawaian
- d. Pemeliharaan dan kebersihan gedung kantor, peralatan.
- e. Menginventarisi peralatan kantor
- f. Mengkoordinir kegiatan upacara hari-hari besar, apel pagi dan apel sore.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam Rencana Strategis Kecamatan Batui untuk dari tahun 2017 – 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	90	95	95	

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah serta mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka Kecamatan Batui tertuang pula program yang harus dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun 2017 – 2021 yaitu sebagai berikut :

7.2

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017 -2021

No	Program	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan adm perkantoran	90	98,3	99,8	99,9	100	100
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100	99,9	100	100	100	100
	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				95	98	100	100
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Disiplin ASN dilingkungan Kec. Batui		100	100	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian			100	100	100	100
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100	100
	Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,5	99,9	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Batui merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Renstra Kecamatan Batui Tahun 2017-2021 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Banggai Tahun 2017-2021 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai RPJMD Kabupaten Banggai 2017-2021.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan kecamatan Batui dan menjadi Pedoman bagi kecamatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2017 – 2021.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Batui Tahun 2017-2021, maka kecamatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2017-2021 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batui Tahun 2017 -2021. Kecamatan Batui juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2017 – 2021.